

Transformasi Manajemen Pelatihan Non-Tahapan: Studi Model Cangkrukan Demokrasi Bawaslu Jawa Timur sebagai Strategi *Capacity Building* Pengawasan

Devita Fitryana Susanto

Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
devita.23202@mhs.unesa.ac.id



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 4 Desember 2025

Page: 1365-1371

Article History:

Received: 25-11-2025

Accepted: 29-11-2025

Abstrak : Pelatihan non-tahapan di lembaga pengawas pemilu perlu ditransformasi menjadi strategi pembelajaran yang adaptif, partisipatif, dan kontekstual untuk memperkuat kapasitas pengawasan berbasis masyarakat. Penelitian ini menganalisis model Cangkrukan Demokrasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai inovasi manajemen pelatihan non-tahapan dalam *capacity building* pengawasan partisipatif. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, studi literatur, dan analisis dokumentasi program, penelitian ini mengungkapkan bahwa Cangkrukan Demokrasi berhasil mengintegrasikan fleksibilitas desain pembelajaran responsif, aksesibilitas daring lintas wilayah, pembelajaran berbasis pengalaman *peer-to-peer*, dan nilai-nilai kearifan lokal Jawa dalam kerangka andragogi modern. Temuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi aktif peserta (40% per sesi), penguatan pemahaman pengawasan partisipatif, dan peningkatan *self-efficacy* aparatur di tingkat lokal. Model Cangkrukan Demokrasi terbukti efektif sebagai strategi *capacity building* berkelanjutan yang dapat direplikasi oleh lembaga pengawas pemilu dan organisasi publik lainnya di Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran yang demokratis, kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Manajemen Pelatihan; Cangkrukan Demokrasi; Penguatan Kapasitas; Pengawasan Partisipatif; Pembelajaran Non-formal; Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Transformasi manajemen pelatihan dalam organisasi publik telah menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di era *modern* yang ditandai oleh dinamika sosial, politik, dan teknologi yang semakin kompleks. Pelatihan tidak lagi dimaknai sekedar sebagai kegiatan rutin yang bersifat formal, seremonial, dan kaku, melainkan dipahami sebagai proses pembelajaran yang

berkesinambungan, dinamis, responsif, serta selaras dengan kebutuhan nyata dan spesifik organisasi (Noe, Clarke, & Klein, 2014). Dalam kerangka penguatan demokrasi, pelatihan yang berbasis partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kesadaran kolektif, menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi, sekaligus mendorong keterlibatan aktif publik dalam pengawasan pemilu (Norris, 2014). Di Indonesia, lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadapi tantangan besar dalam menyelenggarakan pengawasan yang efektif di tengah luasnya wilayah, keragaman sosial budaya, serta kompleksitas permasalahan teknis dan politis dalam penyelenggaraan pemilu (Sutrisno & Fitriyah, 2019). Kondisi tersebut menuntut adanya inovasi dalam strategi *capacity building* yang tidak hanya mengandalkan pelatihan konvensional berjenjang, tetapi juga mengembangkan model-model alternatif yang lebih fleksibel, kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat di tingkat lokal.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur merespons kebutuhan tersebut dengan mengembangkan model Cangkrukan Demokrasi sebagai suatu pendekatan pelatihan non-formal yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pengawasan partisipatif. Model ini berakar pada nilai-nilai kearifan lokal Jawa yang menjunjung tinggi budaya musyawarah, dialog terbuka, prinsip kesetaraan, dan kedekatan emosional dalam forum diskusi (Wibowo, 2018). Pendekatan ini menempatkan peserta bukan sekedar sebagai objek pelatihan, tetapi sebagai subjek yang aktif berpartisipasi, menyampaikan pengalaman, serta mengkonstruksi pengetahuan secara bersama. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan non-formal cenderung memiliki efektivitas yang tinggi dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena mampu menyediakan ruang belajar yang lebih demokratis, fleksibel, dan kontekstual, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah diinternalisasi dan diimplementasikan (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Meskipun demikian, kajian mengenai transformasi model pelatihan non-tahapan dalam ranah pengawasan pemilu masih relatif minim. Sebagian besar studi masih berfokus pada evaluasi pelatihan formal dan berjenjang di lembaga pemerintah (Saifuddin, 2020), sementara eksplorasi terhadap model alternatif seperti cangkrukan sebagai bagian dari strategi *capacity building* pengawasan partisipatif belum banyak dilakukan. Selain itu, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana kearifan lokal dapat dipadukan secara sistematis dan terencana dengan prinsip-prinsip manajemen pelatihan *modern* guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat (Priyono, 2016). Penelitian Hidayat dan Asmara (2021) memang menyoroti *problem* rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Indonesia, namun belum sampai pada pembahasan tentang model-model pelatihan inovatif yang secara konkret dapat dijadikan solusi di tingkat praksis.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pendokumentasian dan analisis kritis terhadap praktik-praktik inovatif dalam manajemen pelatihan yang telah teruji di lapangan, tetapi belum memperoleh perhatian memadai dalam kajian ilmiah. Praktik-praktik tersebut, jika tidak segera dikaji dan didokumentasikan, berpotensi terputus dan sulit direplikasi di konteks lain. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai *adult learning theory* dan

participatory training di lingkungan organisasi publik Indonesia, khususnya melalui upaya integrasi perspektif kearifan lokal dalam kerangka *capacity building modern* (Knowles, Holton, & Swanson, 2015). Integrasi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa dan pelatihan partisipatif dapat dioperasionalkan dalam konteks kelembagaan pengawas pemilu yang memiliki karakteristik birokratis, tetapi di saat yang sama dituntut untuk responsif terhadap dinamika masyarakat. Dari sisi praktik, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi lembaga pengawas pemilu di berbagai daerah di Indonesia untuk mengadopsi dan mengadaptasi model pelatihan yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu (Martani & Wibowo, 2022). Pergeseran dari model pelatihan konvensional yang cenderung satu arah menuju model non-tahapan seperti Cangkrukan Demokrasi dipandang berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu melalui penguatan kapasitas partisipatif yang berkelanjutan, berakar pada konteks lokal, dan mampu menjembatani jarak antara lembaga pengawas dan masyarakat (Fitriani, 2020).

Secara lebih spesifik, urgensi penelitian ini juga terkait dengan kebutuhan untuk menyusun kerangka konseptual yang dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana praktik-praktik pelatihan non-formal berbasis kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam desain kebijakan pengawasan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi praktik, tetapi juga berupaya mengkolaborasi implikasi teoritis dan praktis dari transformasi model pelatihan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama yaitu bagaimana model Cangkrukan Demokrasi Bawaslu Jawa Timur mentransformasi manajemen pelatihan non-tahapan menjadi strategi *capacity building* pengawasan partisipatif yang efektif. Pertanyaan ini mencakup dimensi desain, proses, serta hasil yang dihasilkan dari implementasi model dimaksud. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian adalah menganalisis mekanisme transformasi manajemen pelatihan non-tahapan melalui model Cangkrukan Demokrasi dan mengevaluasi kontribusinya terhadap penguatan kapasitas pengawasan partisipatif di Jawa Timur. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pelaksanaan program Cangkrukan Demokrasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada masa non-tahapan pemilu, dengan fokus pada aspek desain program, proses implementasi, pola interaksi antara penyelenggara dan peserta, serta dampaknya terhadap peningkatan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan pembatasan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam namun tetap terarah mengenai peran Cangkrukan Demokrasi sebagai model transformasi manajemen pelatihan dalam pengawasan pemilu partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui telaah pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan untuk menganalisis transformasi manajemen pelatihan non-tahapan melalui model Cangkrukan Demokrasi serta strategi penguatan

kapasitas kelembagaan pengawas pemilu. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, observasi partisipatif terhadap pelaksanaan program, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Penelitian berlokasi di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada program pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, interpretasi, dan verifikasi yang diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Pendekatan ini memberikan landasan untuk memahami secara komprehensif mekanisme penguatan kapasitas pengawasan partisipatif serta menelusuri bagaimana nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan ke dalam desain pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cangkrukan Demokrasi sebagai program rutin Bawaslu Provinsi Jawa Timur menunjukkan transformasi signifikan dalam pengelolaan pelatihan non-tahapan pengawasan pemilu. Program yang dilaksanakan secara daring melalui *platform* Zoom melibatkan narasumber dari berbagai koordinator divisi kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan peserta meliputi staf Datin (Data dan Informasi), staf humas, serta aparat pengawas di tingkat kabupaten/kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model Cangkrukan Demokrasi berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipatif dengan nilai-nilai kearifan lokal Jawa dalam kerangka pembelajaran berkelanjutan. Sesuai dengan perspektif Knowles, Holton, dan Swanson (2015), program ini mencerminkan praktik andragogi, di mana peserta diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses konstruksi pengetahuan, bukan hanya penerima materi secara pasif. Pola diskusi interaktif yang digunakan mendorong terbentuknya ruang dialog terbuka, sehingga pengalaman lapangan yang dibawa oleh peserta dapat diolah menjadi materi pembelajaran bersama.

Pertama, desain program Cangkrukan Demokrasi menampilkan fleksibilitas tematik yang responsif terhadap kebutuhan spesifik pengawasan pemilu di setiap periode non-tahapan. Setiap penyelenggaraan menghadirkan tema berbeda yang disesuaikan dengan dinamika permasalahan teknis dan sosial-politik terkini di Jawa Timur. Temuan menunjukkan bahwa dari 12 sesi Cangkrukan Demokrasi yang dianalisis selama periode penelitian, tema-tema berkisar dari penguatan mekanisme pengawasan partisipatif, peningkatan literasi pemilu masyarakat, hingga strategi penanggulangan disinformasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "kontekstualisasi pembelajaran" yang dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2017) dalam penelitian mereka mengenai efektivitas pelatihan non-formal. Mereka menegaskan bahwa penyajian materi yang dikaitkan dengan kondisi nyata di lingkungan organisasi mampu meningkatkan relevansi serta memperkuat proses internalisasi pengetahuan. Keluwesan model ini memberi ruang bagi aparat Bawaslu di tingkat daerah untuk terus meningkatkan kompetensinya sesuai dinamika perubahan pemilu di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini mampu mengatasi keterbatasan pola pelatihan berjenjang konvensional yang cenderung terikat pada kurikulum tetap.

Kedua, mekanisme pelaksanaan melalui *platform* Zoom memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi seluruh staf Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur. Data observasi menunjukkan tingkat partisipasi rata-rata 85% dari total

peserta yang diundang, dengan rata-rata 90-100 peserta per sesi. Tingkat aksesibilitas tersebut memperluas jangkauan *capacity building* yang sebelumnya kerap terhambat oleh faktor geografis dan biaya mobilisasi. Rahayu dan Sulistyaningsih (2021) menegaskan bahwa aksesibilitas dan inklusivitas dalam program pengembangan kapasitas merupakan prasyarat penting bagi terciptanya proses pembelajaran yang merata dan berkelanjutan di seluruh unit kerja. Dalam konteks ini, format daring memungkinkan penyebaran pengetahuan dan pengalaman lintas wilayah secara lebih setara, memperkuat ikatan kelembagaan, serta membuka peluang untuk dokumentasi materi yang lebih sistematis bagi kebutuhan pembelajaran di masa mendatang.

Ketiga, peran narasumber dari berbagai koordinator divisi di tingkat kabupaten/kota menciptakan dinamika pembelajaran berbasis pengalaman praktis lapangan. Para narasumber tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga membagikan *lessons learned* dari praktik pengawasan pemilu di daerah masing-masing. Pendekatan *peer-to-peer learning* ini sejalan dengan teori pembelajaran komunitas (*community of practice*) yang menekankan transfer pengetahuan antar praktisi. Solichin (2019) mencatat bahwa efektivitas Bawaslu dalam memperkuat pengawasan pemilu partisipatif sangat ditentukan oleh kapasitas lembaga ini untuk memfasilitasi pertukaran praktik terbaik antar daerah. Dengan demikian, pembelajaran yang dihasilkan menjadi lebih otentik karena bersumber dari pengalaman nyata di lapangan yang dihadapkan pada variasi konteks sosial-politik lokal.

Keempat, pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal Jawa dalam format dan dinamika Cangkrukan Demokrasi menunjukkan adanya upaya sadar untuk memadukan tradisi musyawarah, kesetaraan, dan rasa kebersamaan dengan prinsip-prinsip manajemen pelatihan *modern*. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa peserta merasa lebih nyaman berpartisipasi dalam forum yang mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap kontribusi setiap individu. Norris (2014) menegaskan bahwa pelatihan berbasis partisipasi masyarakat merupakan instrumen strategis untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap proses demokrasi. Dengan menginkorporasikan nilai-nilai lokal tersebut, Cangkrukan Demokrasi tidak hanya menjalankan fungsi transfer pengetahuan, tetapi juga membangun ikatan emosional dan identitas kolektif di antara peserta, sehingga pelatihan dipersepsikan sebagai proses pemberdayaan yang bermakna secara kultural.

Kelima, dampak program terhadap peningkatan pemahaman dan kapasitas partisipatif peserta terukur melalui peningkatan kualitas pertanyaan dan kontribusi diskusi sepanjang seri Cangkrukan. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah peserta yang aktif bertanya dan menyampaikan pengalaman praktis mereka, mencapai rata-rata 40% dari total peserta per sesi. Peningkatan ini menunjukkan tumbuhnya kepercayaan diri dan keberanian peserta untuk menyuarakan pandangan dalam forum pembelajaran publik. Temuan ini sejalan dengan Sukmana dan Agustina (2022) yang menyimpulkan bahwa pendekatan dialogis dalam pelatihan partisipatif mampu memperkuat *self-efficacy* peserta dan mendorong pola pembelajaran yang lebih reflektif serta berkesinambungan. Dalam konteks ini, Cangkrukan Demokrasi terbukti menggeser pola pelatihan dari model

satu arah berbasis ceramah menuju model konstruksi pengetahuan yang lebih kolaboratif.

Secara komprehensif, model Cangkrukan Demokrasi membuktikan bahwa strategi *capacity building* yang mengintegrasikan fleksibilitas desain, aksesibilitas teknologi, pembelajaran berbasis pengalaman, dan nilai-nilai kearifan lokal mampu menciptakan transformasi bermakna dalam manajemen pelatihan non-tahapan. Program ini bukan sekedar aktivitas rutinan, melainkan mekanisme sistematis untuk memperkuat kapasitas pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, kontekstual, dan berakar pada modal sosial-budaya lokal. Dengan demikian, Cangkrukan Demokrasi dapat direplikasi bagi lembaga pengawas pemilu dan organisasi publik lainnya di Indonesia dalam mentransformasikan manajemen pelatihan menuju paradigma pembelajaran yang lebih demokratis, partisipatif, dan adaptif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model Cangkrukan Demokrasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur berhasil mentransformasi manajemen pelatihan non-tahapan menjadi strategi *capacity building* pengawasan partisipatif yang efektif dan berkelanjutan. Transformasi ini terwujud melalui tiga mekanisme utama yaitu pertama, integrasi sistematis antara fleksibilitas desain pembelajaran yang responsif terhadap konteks dinamis pemilu dengan nilai-nilai kearifan lokal Jawa yang mengutamakan musyawarah dan kesetaraan. Kedua, pemanfaatan teknologi daring (Zoom) sebagai medium aksesibilitas untuk memperluas jangkauan pelatihan lintas wilayah kabupaten/kota se-Jawa Timur tanpa mengorbankan kualitas interaksi pembelajaran. Ketiga, penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi) melalui format *peer-to-peer learning* yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif pengkonstruksi pengetahuan kolaboratif.

Secara empiris, program ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam partisipasi aktif peserta (40% peserta berkontribusi per sesi), penguatan pemahaman tentang pengawasan partisipatif, dan peningkatan *self-efficacy* aparatur Bawaslu di tingkat lokal. Model ini membuktikan bahwa transformasi pelatihan non-tahapan bukan hanya tentang transfer pengetahuan teknis, tetapi juga tentang pemberdayaan sosial-budaya yang bermakna. Temuan ini memberikan implikasi praktis bahwa Cangkrukan Demokrasi dapat direplikasikan bagi lembaga pengawas pemilu dan organisasi publik lainnya di Indonesia dalam mengembangkan strategi *capacity building* yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada pelibatan masyarakat yang berkelanjutan dalam pengawasan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamzah, A., & Purwoko, B. (2020). Evaluasi efektivitas pelatihan aparatur sipil negara dalam meningkatkan kinerja organisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 145–162.
- [2] Hidayat, R., Rohman, A., & Muhamad, S. (2019). Inovasi *capacity building* berbasis kearifan lokal untuk penguatan demokrasi di desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 23–40.

- [3] Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). New York: Routledge.
- [4] Kurniawan, T., & Setyowati, E. (2020). Standardisasi versus fleksibilitas dalam program pengembangan kapasitas sektor publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(3), 201–218.
- [5] Noe, R. A., Clarke, A. D., & Klein, H. J. (2014). Learning in the twenty-first-century workplace. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 1(1), 245–275.
- [6] Norris, P. (2014). Why electoral integrity matters. *Journal of Democracy*, 25(4), 73–86.
- [7] Nurhasim, M. (2016). Partisipasi pemilih dan pengawasan pemilu: Studi perbandingan pemilu 2009 dan 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 56–73.
- [8] Pratikno, & Lay, C. (2021). Penguatan pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 167–184.
- [9] Purwanto, & Sulistyastuti, D. R. (2017). Analisis implementasi pelatihan non-formal dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 3(1), 1–18.
- [10] Rahayu, S., & Sulistyaningsih, T. (2021). Model capacity building untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. *Indonesian Journal of Public Administration*, 7(2), 112–129.
- [11] Solichin, M. R. (2019). Peran Bawaslu dalam penguatan pengawasan pemilu partisipatif di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 5(2), 89–106.
- [12] Sukmana, O., & Agustina, D. (2022). Pendekatan dialogis dalam pelatihan partisipatif: *Lesson learned* dari program pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 45–64.
- [13] Tjakraatmadja, J. H., & Martini, L. (2016). Knowledge management dalam konteks organisasi pembelajaran. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 15(3), 234–251.
- [14] Wibowo, E. (2018). Kearifan lokal dalam pengembangan capacity building organisasi publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 24(2), 156–171.
- [15] Wicaksono, K. W. (2018). Analisis implementasi diklat struktural bagi pegawai negeri sipil. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 178–195.